

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN REGULASI TERHADAP PENERAPAN ANGGARAN KOPERASI

Komang Adi Kurniawan Saputra¹⁾, Gede Mandirta Tama²⁾

1) Universitas Warmadewa, komangadikurniawan@gmail.com

2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan INATA Singaraja,

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the influence of human resource competency and regulation implementation on the budgeting implementation at the cooperative in Buleleng regency, Bali Province. The population in this research is cooperative in Buleleng Regency, Bali Province as many as 283 cooperatives. Based on random sampling technique of slovin formula this study obtained 74 cooperatives as the sample of this study. The number of respondents in this study are 222 respondents consist of people directly involved in the cooperatives management such as Supervisors, Management and Members of Cooperatives. Based on multiple regression analysis, this study found that human resource competency and regulation implementation has significant influence on the budgeting implementation.

Key words: *human resource competency, regulation implementation, budgeting implementation*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari gerakan ekonomi dari entitas bisnis baik yang dimiliki oleh negara ataupun milik swasta dengan bentuk entitas bisnis. Berbagai entitas bisnis telah berdiri dan berjalan sesuai dengan kegiatan operasional masing-masing yang tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan atau sisa lebih atas hasil kegiatan bisnis untuk dapat meningkatkan kegiatan operasional dan *stakeholder*. Selain itu, entitas bisnis tersebut mampu berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat umum dan peningkatan perekonomian (Saputra, 2015). Salah satu entitas yang berkontribusi tidak saja pada kegiatan operasional dan *stakeholder*, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat umum sesuai dengan prinsip kekeluargaan adalah koperasi.

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama sejalan dengan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selain itu pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam penerapan manajemen pada koperasi terdapat beberapa tahapan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Salah satu tahapan yang dilakukan manajemen ketika memulai operasional adalah perencanaan. Manajemen melakukan perencanaan yang baik

dan sesuai dengan tujuan entitas yang diharapkan akan membawa entitas tersebut mampu untuk melakukan pengendalian, pelaporan, mengalami peningkatan, dan menciptakan produk-produk yang lebih luas. Perencanaan yang dibuat manajemen dapat pula disebut dengan anggaran (Saputra dan Kurniawan, 2017).

Penerapan anggaran pada koperasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.MUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Anggaran yang dibuat berupa Anggaran Dasar sebagai syarat utama dalam pendirian koperasi dan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Penerapan anggaran pada koperasi tentu memerlukan sumber daya manusia, modal, aturan, informasi yang tepat dan jelas, kejelasan struktur organisasi dan faktor lainnya.

Sumber daya manusia yang kompeten dalam hal merencanakan anggaran pada koperasi sangat diperlukan didalam penerapan anggaran. Sumber daya manusia yang dimiliki koperasi terdiri dari pengawas, pengurus, dan anggota koperasi. Pengelolaan sumber daya manusia dapat dimulai dari internal koperasi sendiri dengan mengadakan pelatihat-pelatihan atau pengembangan kepribadian sehingga dapat membawa pelayanan dan sistem kerja yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia pada koperasi dalam pekerjaan dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau pengembangan diri yang dilakukan oleh lembaga/instansi lainnya yang relevan untuk menunjang aktivitas kerja khususnya dalam hal anggaran.

Pada kenyataannya, adanya peningkatan jumlah koperasi tidak dibarengi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik sesuai dengan perkembangan jaman dan kurangnya peningkatan diri terhadap kemampuan diri sendiri sehingga masih terjadi permasalahan pengelolaan pada koperasi yang disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan tidak sesuai dengan kemampuan dibidangnya. Permasalahan koperasi terjadi pada daerah-daerah di Indonesia terutama di Bali. Permasalahan terjadi meliputi permasalahan sumber daya manusia, manajemen, permodalan, pemasaran, dan rapat anggota tahunan (RAT). Menurut Kepala Dinas KUKM Provinsi Bali (*Suluhbali.co* diakses tanggal 24 Maret 2018) menyatakan bahwa permasalahan yang umumnya dialami oleh koperasi di Bali adalah masalah sumber daya manusia, belum menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), masalah permodalan, dan pemasaran. Begitu pula di Kabupaten Buleleng yang menjadi objek penelitian ini yang menunjukkan bahwa masih terjadi permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi. Menurut I Made Budi Astawa sebagai Kepala Dinas KUKM Kabupaten Buleleng (*balipuspanews.com* diakses tanggal 24 Maret 2018), mengungkapkan bahwa koperasi yang memiliki kategori sakit yang disebabkan oleh permasalahan keuangan, manajemen dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan dengan baik.

Dari Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, mencerminkan bahwa kurangnya kemampuan pengelola koperasi didalam pengelolaannya baik secara material maupun non material. Dalam Penelitian Bakar, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai nilai informasi pelaporan keuangan SKPD Provinsi Aceh menemukan hasil bahwa dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan optimal serta pengendalian yang memadai diharapkan

pengelolaan keuangan daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang bernilai andal dan tepat waktu. Kesimpulannya adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Nilai informasi pelaporan keuangan ini nantinya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran di instansi tersebut.

Dalam pengelolaan usaha dan berada pada wilayah hukum, koperasi sebagai entitas bisnis harus mampu mematuhi regulasi yang berlaku baik berkenaan dengan pengelolaan koperasi maupun diluar pengelolaan koperasi sebagai pondasi dalam aktivitasnya. Aturan atau dalam penelitian ini yang dimaksud adalah regulasi yang diatur oleh pemerintah berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdapat pasal yang mengatur terkait dengan pendirian koperasi yang didalamnya, koperasi harus membuat anggaran dasar. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi bahwa dalam hal penerapan akuntabilitas, koperasi dapat melakukannya dengan salah satu cara yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) yang melibatkan anggota dan rencana kerja (RK) koperasi. Begitupun pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang memaparkan bahwa laporan keuangan yang dibuat koperasi dapat mengacu pada standar akuntansi keuangan umum dan entitas tanpa akuntabilitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam koperasi. Laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi, nantinya sebagai acuan dalam penerapan anggaran koperasi yang sesuai kebutuhannya.

Dalam penelitian Huvat (2017) di Koperasi CV Daya Lestari menemukan bahwa Koperasi CV Daya Lestari telah menerapkan SAK-ETAP pada laporan keuangan dengan tingkat kesesuaian sebesar 94%. Namun, komponen yang masih belum sesuai dengan SAK-ETAP terdiri atas laporan pajak penghasilan, aset, dan kewajiban pajak dan beban pajak. Dalam penelitian Hertiyo (2015) di Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi, Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember menemukan bahwa laporan yang dibuat sebatas perhitungan hasil usaha dan neraca, dan laporan keuangan yang telah disajikan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan regulasi terhadap penerapan anggaran pada koperasi di Kabupaten Buleleng.

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

KAJIAN TEORI

Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Tujuan dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah "Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Prinsip Koperasi meliputi Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Dalam mengembangkan sebuah koperasi, maka perlu melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai pendidikan perkoperasian dan kerjasama antarkoperasi (UU No. 25 Tahun 1992). Dalam perkembangannya, ada beberapa jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder (Purba, 2015). Menurut Hendar dan Kusnadi (1999) dalam Wulandari (2006), ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa. Sebagai sebuah organisasi, koperasi memiliki sub sistem untuk dapat mengelola sehingga mampu tetap beroperasi melayani anggota dan masyarakat umum yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas (UU No. 25 Tahun 1992).

Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi (2001) dalam Atmadja, dkk (2016:1). Penerapan anggaran yang diterapkan setiap organisasi disesuaikan dengan keadaan dan kondisi organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, penerapan anggaran yang digunakan adalah Anggaran komprehensif yang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran komprehensif dalam penelitian ini adalah Anggran operasional diwujudkan dalam Rencana Kerja, sedangkan anggaran keuangan diwujudkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi. Komposisi Rencana Kerja pada koperasi antara lain: rangkuman rencana kegiatan, capaian satu periode, cara pencapaian tujuan, sumber rencana kerja, merinci kebutuhan barang/jasa, menjelaskan dan merinci alat atau barang yang diperlukan untuk pelaksanaan. Anggaran sebagai rencana kerja dapat menggambarkan mengenai penerimaan dan penggunaan modal. Begitupula dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi pada koperasi menggambarkan mengenai pendapatan dan belanja koperasi dalam satu periode (satu tahun).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya manusia dapat dibentuk dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan dirinya sendiri yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaannya terutama pada penerapan anggaran yaitu berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Hutapea dan Thoha, 2008 dalam Rahim, 2015).

Penerapan Regulasi Koperasi

Sebagai entitas bisnis yang dikelola oleh anggota sendiri, koperasi harus mematuhi regulasi yang tersedia. Regulasi yang diterapkan koperasi berupa aturan-aturan baik Undang-Undang maupun aturan pelaksanaannya yang didalamnya dijabarkan standar-standar yang digunakan untuk mencapai tata kelola yang baik. Penerapan regulasi pada koperasi meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memaparkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi pada Pasal 6 bahwa pelaksanaan penerapan akuntabilitas oleh koperasi dilakukan dengan cara antara lain (1) Menyusun dan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran secara tertulis, (2) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) dengan melibatkan anggota, (3) Menyelenggarakan pencatatan dalam buku administrasi organisasi koperasi, dan (4) Menyelenggarakan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Selain itu Pada Peraturan tersebut Pasal 7 memaparkan bahwa penerapan aspek akuntabilitas usaha dan pelayanan kepada anggota dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan usaha dan pelayanan yang lebih baik kepada para anggota dan masyarakat disekitarnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di wilayah kerja koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang menjelaskan bahwa Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum). Jadi, dalam aturan tersebut mensyaratkan kepada koperasi untuk memilih standar akuntansi yang diikuti dan disesuaikan dengan kondisi pada koperasi dengan tetap mengacu pada aturan tersebut.

HIPOTESIS

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran

Menurut Hutapea dan Thoah (2008 dalam Rahim (2015)), kompetensi sumber daya manusia dapat dibentuk dengan komponen-komponen yang berhubungan dengan dirinya sendiri yang dapat berpengaruh terhadap pekerjaannya terutama pada penerapan anggaran yaitu berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). Penelitian yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) menemukan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitupula pada penelitian Sudiartini, dkk (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, rumusan hipotesisnya sebagai berikut.

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penerapan Anggaran.

Pengaruh Penerapan Regulasi Terhadap Penerapan Anggaran pada Koperasi

Penerapan Regulasi dalam penelitian ini adalah regulasi yang diterapkan koperasi berkaitan dengan penerapan anggaran koperasi. Regulasi tersebut meliputi undang-undang yang mengatur tentang anggaran dasar, peraturan terkait dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, rencana kerja, dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Hadiningrum (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri KUKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012 pada KOPMA UNS secara umum telah diterapkan. Begitupula Yelitasari (2016) dalam penelitiannya memaparkan bahwa koperasi pilar utama telah menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP, akan tetapi beberapa koperasi yang diteliti belum sepenuhnya menerapkannya. Dari pemaparan tersebut menunjukkan penerapan regulasi pada koperasi terutama dalam standar akuntansi keuangan yang diterapkan, pada intinya telah menerapkan syarat peraturan yang telah diatur sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam anggaran berikutnya dengan demikian, rumusan hipotesisnya sebagai berikut.

H₂ : Regulasi berpengaruh terhadap Penerapan Anggaran.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah berbentuk angka (Saputra, dkk, 2018). Dalam penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan regulasi terhadap penerapan anggaran pada koperasi, pengumpulan data menggunakan kuesioner yang akan diberikan pada pengawas, pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 283 koperasi. Dari populasi tersebut, maka dilakukan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin, yaitu : (Usman, 2007)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

- n = Ukuran sampel/jumlah responden
- N = Ukuran populasi
- e = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir = 0,10

Berdasarkan rumus solvin diatas, maka dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 283 Koperasi di Kabupaten Buleleng dengan persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%, perhitungan dan hasil sampel penelitian yaitu:

$$n = \frac{283}{1+283(e0,1)^2} = 73,9$$

Berdasarkan perhitungan sampel penelitian diatas, sampel penelitian ini sejumlah 73,9 dibulatkan menjadi 74 Koperasi di Kabupaten Buleleng.

Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan dengan melihat pihak yang terlibat dalam penerapan anggaran sejumlah 3 pihak yang terdiri dari Pengawas, Pengurus, dan anggota koperasi. Jika melihat jumlah sampel penelitian, maka jumlah responden sejumlah 222 responden pada koperasi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan alat yang digunakan berupa kuesioner kepada responden sebagai sumber data. Kuesioner disusun secara tertulis, terstruktur, dan sistematis dan kuesioner akan langsung didistribusikan ke lokasi penelitian untuk diajukan, diisi atau dijawab oleh responden.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dalam analisis data penelitian ini menggunakan bantuan program *Statistical Package for Social Sciense (SPSS) v.20*. Uji data pertama yang dilakukan adalah uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan reliabilitas yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner dan mengukur tingkat konsistensi data dari waktu ke waktu. Uji Validitas yang dilakukan menggunakan metode *product moment pearson* dan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2011: 47-48). Sedangkan uji reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2012). Uji data kedua yang dilakukan adalah uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan nilai yang digunakan adalah 0,05 (Ghozali, 2009). Uji multikolinearitas menguji

adanya korelasi antar variabel yang dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih dari 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 (Ghozali, 2012). Uji Heteroskedastisitas menggunakan uji gleser dengan nilai signifikansi 0,05 (Ghozali, 2011).

Model analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e$$

Keterangan

Y	=	Penerapan Anggaran pada Koperasi
X _{1t}	=	Kompetensi Sumber Daya Manusia
X _{2t}	=	Penerapan Regulasi
α	=	Konstanta
β ₁ , β ₂ ,	=	Koefisien regresi dari X ₁ , X ₂
e	=	<i>erro term</i> (Standar Error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yakni Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dari 222 kuesioner yang dikirim/disebar kepada responden, kuesioner yang kembali sebanyak 222 eksemplar dengan kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 2 eksemplar sehingga kuesioner yang dapat diolah 220 eksemplar.

Karakteristik responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sejumlah 152 orang dan perempuan sebanyak 68 orang. Hasil uji validitas yang dilakukan berdasarkan data dalam kuesioner dapat diketahui bahwa semua pernyataan variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan regulasi memiliki nilai *pearson correlation* atau $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan berada pada signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan uji reliabilitas pada data menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* dengan hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,465 > 0,05, menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* pada variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel penelitian memiliki nilai kurang dari 10 yang menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Sedangkan uji heteroskedastisitas yang dilakukan dapat diketahui bahwa signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan regulasi lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa dalam model summary diketahui bahwa besarnya R² dalam penelitian ini sebesar 0,352. Hal ini berarti bahwa 0,352 atau 35,2% penerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variasi

variabel independen penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan regulasi, sedangkan sisanya $100\% - 35,2\% = 64,8\%$ dijelaskan oleh sebab lain diluar model regresi. Dalam tabel *coefficients* dapat dilihat nilai t hitung variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan penerapan regulasi (X_2) masing-masing sebesar 6,301 dan 5,214 dengan nilai probabilitas 0,000 dan 0,000 yang berarti terdapat pengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran.

Berdasarkan hasil uji analisis data diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 1 diterima bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran. Hal ini dapat diartikan bahwa kompetensi dalam diri seseorang sangat diperlukan untuk menunjang segala aktivitasnya. Begitupula kompetensi yang dimiliki oleh pengawas, pengurus dan anggota koperasi sebagai kesatuan sistem pengelolaan yang menjalankan operasional koperasi harus memiliki kemampuan, keahlian dan sikap yang mengarah pada peningkatan dan kontribusi kepada koperasi yang dikelola. Peningkatan kompetensi dapat ditunjang dari dirinya dan lingkungannya. Kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi yang dimiliki pengawas, pengurus dan anggota dalam penerapan anggaran sebagai RK dan RAPBK yang akan menjadi acuan untuk aktivitas operasional ditahun berjalan. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini pengawas, pengurus dan anggota koperasi sangat diperlukan dalam penerapan anggaran dan memiliki pengaruh didalamnya. Arah sebuah anggaran ditentukan oleh pengawas, pengurus dan anggota yang terlibat dalam penerapannya sehingga tercapainya suatu program sangat ditentukan dari kerja para pengelolanya. Dengan demikian, pengawas, pengurus dan anggota koperasi yang mampu dan berkompeten akan cenderung melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan yang tidak memiliki kompetensi dalam pekerjaannya (Nurillah, 2014). Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ihsanti (2014) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Informasi laporan keuangan tersebut digunkan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan diperiode berikutnya dalam sebuah rencana kerja.

Hipotesis 2 dinyatakan diterima, yang mana dapat diartikan bahwa variabel penerapan regulasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan regulasi didalam organisasi baik yang dibuat oleh internal maupun eksternal organisasi dapat mempengaruhi aktivitas operasional didalamnya. Begitupula dengan koperasi, yang mana koperasi juga merupakan satu kesatuan hukum yang mengingat dalam aktivitas operasionalnya yang harus taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penerapan regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur terkait anggaran dasar koperasi sebagai prasyarat pembentukan dan acuan dasar dalam pengelolaan koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/PerM.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/PerM.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil yang mengatur terkait praktik akuntabilitas dilakukan dengan cara menyusun RK dan RAPBK, penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, dan

pengawasan yang dilakukan untuk pengelolaan koperasi. Penerapan regulasi tersebut dapat memperkuat keberadaan koperasi sebagai program keberlanjutan koperasi. Perlu disadari bahwa penerapan regulasi penting untuk ditaati dan dipatuhi sehingga dapat memberikan arah dan pedoman yang baik dan tepat kepada pengelolanya terutama dalam penerapan anggaran. Regulasi tersebut memberikan acuan kepada koperasi untuk bertindak didalam proses pengelolaannya sehingga diharapkan tidak terjadi permasalahan yang berakibat pada nonaktifnya koperasi.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan penerapan regulasi (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini pengawas, pengurus dan anggota koperasi sangat diperlukan dalam penerapan anggaran dan memiliki pengaruh didalamnya, yang mana arah sebuah anggaran ditentukan oleh pengawas, pengurus dan anggota yang terlibat dalam penerapannya sehingga tercapainya suatu program sangat ditentukan dari kerja para pengelolanya. Begitupula pada penerapan regulasi penting untuk ditaati dan dipatuhi sehingga dapat memberikan arah dan pedoman yang baik dan tepat kepada pengelolanya terutama dalam penerapan anggaran baik berupa Rencana Kerja (RK) maupun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).

Disadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan didalamnya yang melekat yang dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, yang mana kemungkinan adanya persepsi yang berbeda antara peneliti dan responden didalam memahami setiap item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dan adanya keterbatasan waktu didalam penyebarannya sehingga kehati-hatian responden dalam memahami dan menjawab kuesioner masih kurang.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dari segi waktu penyebaran kuesioner dengan jangka waktu penyebaran yang telah diatur sehingga responden dapat memahami dengan baik isi setiap pernyataan. Perlunya mengkombinasikan dengan metode wawancara disetiap penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada pengawas, pengurus dan anggota koperasi sehingga persepsi responden atas pernyataan dan kondisi di lapangan dapat diketahui lebih dalam. Selain itu pula, variabel-variabel yang digunakan selanjutnya lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang kemungkinan memiliki hubungan dengan penerapan anggaran seperti budaya organisasi yang dipadukan dengan budaya organisasi setempat atau dilihat dari eksternal yang mempengaruhi penerapan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi. 2017. *52 Koperasi di Buleleng Sakit, ini Pemicunya*. [Online]. Tersedia pada <https://www.balipuspanews.com/52-koperasi-di-buleleng-sakit-ini-pemicunya.html>. [Diakses tanggal 24 Maret 2018].
- Atmadja, dkk. 2016. *Penganggaran*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bakar, Usman, dkk. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 43-58).
- Ghozali, Imam. 2009. *SPSS. Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2012. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiningrum, Anggraini Wahyu. 2015. *Evaluasi Penerapan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 4/Per/M.KUKM/VII/2012 (Studi Kasus pada Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret)*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- Hertiyo, Dimas Andika. 2015. *Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi Berbasis SAK-ETAP*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Huvat, Yohanes Juan. 2017. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Koperasi CU (Credit Union) Daya Lestari di Samarinda. *Jurnal Ekonomia*, Volume 6, Nomor 1.
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*.
- Kiranayanti, Ida Ayu Enny dan Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 16 Nomor 2 (hlm. 1290-1318).
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi.
- Nurillah, As Syfia. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Purba, Orinton. 2015. *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- Rahim, SR. 2015. Artikel. [Online]. Tersedia pada <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6657/Bab%202.pdf?>. [Diunduh tanggal 25 Maret 2018].
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Saputra, K.A.K. (2015). [Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa](#). *BISMA Jurnal Manajemen*, Vol. 1, No.1 2015.
- Saputra, K.A.K., dan I.P. Julianto. (2016). [Pembentukan Bumdesa Dan Komunitas Wirausaha Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Desa](#). *Prosiding Seminar Nasional TEAM*, 2016.
- Saputra, K.A.K., A.T. M.K. Koswara., dan A.T. Atmadja. (2017). Pengaruh Penerapan Metode Case-Based Learning dan Motivasi Terhadap Pemahaman Akuntansi Forensik Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Universitas Jember 2017
- Saputra, K.A.K., dan P.S. Kurniawan. (2017). [Konsep Good Corporate Governance Dan Fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor LPD Di Bali](#). *Simposium Nasional Akuntansi XX*, Universitas Jember 2017
- Sudiarianti, dkk. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Universitas Udayana.
- Suluh Bali. 2013. *Ratusan Koperasi di Bali Bermasalah*. [Online]. Tersedia pada <http://suluhbali.co/ratusan-koperasi-di-bali-bermasalah/>. [Diakses tanggal 24 Maret 2018].
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan Penjelasan dan Amandemennya (1999-2002)*. Surabaya: Penerbit Nidya Pustaka.
- Usman, Umedi. (2007). *Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan pada Perusahaan Rokok di Jawa Timur*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Wulandari, Inne. 2006. *Penerapan Penganggaran Pada Badan Usaha Berbentuk Koperasi (Studi Kasus Koperasi Karyawan Indocement)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Yelitasari, Viona. 2016. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi di Bandar Lampung)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.